

WAJAH ISLAM NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF PRIBUMISASI ISLAM GUS DUR

Indhra Musthofa

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

indhra.musthofa@unisma.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman yang tercermin pada berbagai macam kehidupan seperti bahasa, budaya serta agama dan kepercayaan. Keragaman ini merupakan kekuatan tersembunyi, akan tetapi keragaman juga kadang menjadi penyebab timbulnya persoalan yang dihadapi bangsa ini sekarang. Sehingga, diperlukan sebuah gagasan yang komprehensif dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dalam konteks Islam Nusantara. Salah satu tokoh yang inten dan *concern* dengan praktik kehidupan yang plural-multikultur adalah Gus Dur. Ide dan gagasan Gus Dur perlu diinterpretasikan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena melalui gagasan Gus Dur, konflik horizontal yang terjadi selama ini akan menemukan solusi yang kontekstual dan komprehensif. Sehingga konflik-konflik yang berhubungan dengan suku, ras atau agama dapat diminimalisir. Tulisan ini difokuskan pada pemikiran Gus Dur mengenai Pribumisasi Islam sebagai salah satu bentuk Islam Nusantara. Ideologi yang dibawa Gus Dur dan penghormatannya terhadap pluralitas sepenuhnya berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Karakteristik pemikiran Gus Dur sangatlah bersifat teologis antropologis yang mengedepankan kontekstual kemasyarakatan. Pengamalan kontekstualisasi Gus Dur tidak hanya mengajarkan toleransi terhadap keyakinan dari agama lain, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran yang baik dari agama lain.

Kata Kunci: pribumisasi, Islam Nusantara, Gus Dur

Abstract

Indonesia is a country full of diversity that is reflected in various kinds of life such as language, culture and religion and belief. This diversity is a hidden force, but diversity is also sometimes the cause of the problems facing this nation today. Therefore, a comprehensive idea is needed in order to create world peace in the context of Islamic Nusantara. One of the most intense and concerned figures with plural-multicultural practices is Gus Dur. Gus Dur's ideas and ideas need to be interpreted in the perspective of national and state life in Indonesia. Because through Gus Dur's ideas, horizontal conflicts over the years will find a contextual and comprehensive solution. So that conflicts related to the ethnic groups, races or religions can be minimized. This paper focuses on Gus Dur's thinking about the Islamic Indigenization as one of Islamic Nusantara forms. The ideology brought by Abdurrahman and his respect for plurality is entirely based on his deep understanding of the teachings of Islam. The characteristic of Abdurrahman's thought is highly anthropological theological that promotes the contextual society. The practice of Gus Dur's contextualism not only teaches tolerance to the beliefs of other religions, but is also accompanied by a willingness to accept the good teachings of other religions.

Keywords: indigenization, Islam Nusantara, Gus Dur

Pendahuluan

Indonesia terkenal dengan Nusantara yang multi-budaya. Sejak berabad-abad lalu, Nusantara Indonesia telah dipengaruhi dan mempengaruhi budaya-budaya dunia lainnya. Kita mengenal pengaruh budaya Hindu-Budha, budaya China, budaya Barat, budaya Arab. Semuanya memberikan pengaruh dalam terbentuknya Nusantara yang pluralistik (Tilaar, 2004:91). Lebih lanjut Ainul yaqin (2005:3) menuturkan, bahwa sejumlah keragaman tersebut merupakan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Akan tetapi keragaman dan keunikan tersebut selama ini tidak mendapatkan tempat dalam proses pembangunan bangsa, bahkan diakui atau tidak keragaman sering menjadi penyebab timbulnya persoalan yang dihadapi bangsa ini sekarang, seperti kolusi, korupsi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain.

Laporan tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia oleh Wahid Foundation pada Tahun 2016 menyatakan terdapat 204 peristiwa dengan 315 tindakan. Jumlah ini naik 7% dari tahun 2015. Pada 2015, jumlah peristiwa yang dilaporkan sebanyak 190 peristiwa dengan 249 tindakan. Meningkatnya intoleransi antar agama dan segala sesuatu yang disandarkan pada Agama dikarenakan salah satu unsur pemahaman agama yang dalam konteks kekinian mengalami radikalisme Agama. Padahal agama dalam mendidik masyarakatnya seharusnya dengan cara damai sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah ketika di kota Makkah

atupun pada saat memimpin di Kota Madinah dengan damai dan sejahtera.

Konflik atas nama SARA (Suku, Ras dan Agama) juga terjadi di Indonesia misalnya konflik antar suku yang terjadi di Lampung pada tahun 2012, konflik yang mengikutsertakan ketersinggungan agama pun juga sering terjadi. Misalnya, konflik Ambon yang terjadi pada tahun 2001 dan 2011. Konflik atas nama agama yang terjadi bukan hanya melibatkan agama yang berbeda, bahkan antar agama pun dapat timbul konflik, semisal konflik antar umat Islam yang megatasnamakan Sunni-Syiah di Sampang pada 2012 lalu yang mengakibatkan pengikut Syiah harus dievakuasi, serta konflik Puger Jember yang berakibat pengrusakan fasilitas warga Syiah pada tahun 2013.

Sebenarnya, keberagaman dalam suatu komunitas dapat memberikan energi positif apabila digunakan sebagai modal untuk dapat bersama membangun bangsa dalam hubungan yang saling memberi dan menerima. Begitu juga sebaliknya apabila keberagaman masih dibingkai oleh penafsiran yang bersumber pada sebuah simbol yang mengikat atau menekan dimana sarat akan prasangka, kecurigaan, bias dan reduksi terhadap kelompok di luar dirinya, maka ia hanya akan menjadi bom penghancur struktur dan pilar kebangsaan (Hilmy, 2003: 333).

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin* yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok manusia, melainkan seluruh isi jagat raya. Namun, terjadi perbedaan pemaknaan universalitas Islam dalam kalangan umat muslim. Kelompok *pertama* mendefinisikan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad dan berbudaya Arab adalah final, sehingga harus diikuti

sebagaimana adanya. Kelompok ini berupaya menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu (budaya Arab), karena budaya yang berbeda dianggap bukan bagian dari Islam. Kelompok ini disebut kelompok fundamentalis. Kelompok kedua memaknai universalitas ajaran Islam sebagai yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke budaya apapun. Sehingga kelompok ini menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang dapat mempengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut kelompok substantif. Kelompok *ketigayang* menengahi keduanya, yang menyatakan, bahwa ada dari sisi Islam yang bersifat substantif, dan ada pula yang literal. (Luthfi, 2016: 3) Barangkali kelompok ketiga ini yang menghadirkan Islam Nusantara sebagai akibat dari “kegagalan” kelompok pertama yang menghadirkan wajah Islam intoleran dan cenderung memaksakan budaya lain, bahkan menggunakan kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Begitu juga kelompok kedua yang dianggap mendistorsi ajaran Islam.

Pribumisasi Islam yang diusung Abdurrahman Wahid (yang selanjutnya disebut sebagai Gus Dur) merupakan salah satu jawaban dalam rangka mengakomodir perbedaan-perbedaan pemahaman atas nama agama yang diharapkan mampu menciptakan kerukunan umat sekaligus sebagai pendewasaan bangsa dalam melihat dan memaknai perbedaan di Indonesia. Pemikiran Gus Dur ini, perlu diinterpretasikan dan ditarik dalam ranah kehidupan bermasyarakat. Karena melalui pendekatan kehidupan masyarakat, konflik horizontal yang terjadi selama ini akan menemukan solusi yang

kontekstual dan komprehensif. Sehingga konflik-konflik yang berhubungan dengan suku, ras atau agama dapat diminimalisir.

Islam Nusantara dalam Perbincangan

Islam Nusantara mulai menggema berawal dari tema muktamar Nahdlatul Ulama’ (selanjutnya disebut NU) ke-33 Agustus 2015 di Jombang. Wacana tentang Islam Nusantara menuai banyak perdebatan di kalangan para intelektual muslim. Islam sebagai substansi ajaran yang turun di Makkah lalu tersebar ke Madinah dan ke daerah-daerah lain seperti negara Yaman, Mesir, Irak, India, Pakistan hingga sampai ke Indonesia dan seluruh dunia. Islam yang menyebar kemudian bertemu dengan budaya setempat. Menurut Quraish Shihab pada waktu seminar di UBAYA (2015) bahwa pada mulanya, Islam di Makkah bertemu dengan budaya Makkah yang mengakibatkan akulturasi antara budaya dan agama, adakalanya Islam menolak budaya, merevisi budaya, dan ada kalanya menyetujui budaya tanpa menolak dan merevisi.

Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam berarti “selamat, aman, damai, patuh, dan taat” (Abudin Nata, 2011: 11). Agama ini memiliki lima ajaran pokok sebagaimana diungkapkan Nabi Muhammad, yaitu “Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan menunaikan haji bagi yang mampu.” (HR. Muslim). Selain itu Islam memiliki dua pedoman yang selalu dirujuk, Al Quran dan Hadits. Keduanya memuat ajaran yang membimbing umat manusia beserta

alam raya ke arah yang lebih baik dan teratur.

Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata ini berasal dari manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke-12 sampai ke-16 sebagai konsep Negara Majapahit. Sementara dalam literatur berbahasa Inggris abad ke-19, Nusantara merujuk pada kepulauan Melayu. (Khabibi M. Luthfi, 2016: 3) Ki Hajar Dewantoro, memakai istilah ini pada abad 20-an sebagai salah satu rekomendasi untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda. Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia. Istilah ini, di Indonesia secara konstitusional juga dikukuhkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) MPR No.IV/MPR/1973, tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E. Kata Nusantara ditambah dengan kata wawasan.

Menurut Muhammad Sulton Fatoni (news.detik.com: 2015) menuturkan bahwa, di antara pemikiran yang muncul tentang Islam Nusantara adalah mengkomparasikannya dengan istilah Islam: *The Straight Path* yang berarti Islam: Jalan Lurus, atau Islam: *Shiratal Mustaqim*. Rangkaian kata *shirathal mustaqim* (Al-Fatihah: 6) bermakna bahwa *shirath* dalam *nash* tersebut adalah agama Islam. Sedangkan maksud *mustaqim* dalam ayat tersebut adalah kemapanan tanpa distorsi (Ahmad as-Shawy, 1813M). Sehingga jika dirangkai menjadi Islam: *Shiratal Mustaqim* menimbulkan kekacauan arti yang bersumber dari kesalahan merangkai kata. Padahal Rasulullah saw menegaskan bahwa Islam itu kesaksian ketuhanan hanya Allah, kerasulan Muhammad saw, komitmen melaksanakan salat, mengeluarkan

zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji saat mampu (Imam Muslim, 875M).

Muncul juga pemikiran mengkomparasikan Islam Nusantara dengan istilah *Islam Rahmatan lil 'Alamin* (Al-Anbiya': 107), *wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin* (Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali untuk mengasihi alam semesta). Ibn Abbas menegaskan bahwa subyek dari misi mengasihi alam semesta adalah Nabi Muhammad saw. Sedangkan obyeknya adalah seluruh umat manusia (At-Thabari: 919M). Maka rangkaian kata '*Islam rahmatan lil 'Alamin*' pun memunculkan kekacauan arti yang disebabkan oleh kesalahan merangkai kata.

Islam Nusantara secara sederhana adalah dua kata yang masing-masing mempunyai makna, dan kedua kata tersebut digabungkan untuk membentuk frasa. Maka jadilah rangkaian Islam Nusantara yang memperlihatkan hubungan erat antara bagian yang diterangkan-menerangkan (Ramlan, 1985). Dalam ilmu bahasa Indonesia jenis penggabungan kata ini disebut aneksi, sehingga Islam Nusantara sama saja dengan terma Islam di Nusantara.

Islam Nusantara memiliki arti yang sama sesuai perspektif gramatika Arab bahwa rangkaian dua kata Islam Nusantara bukan susunan *shifat-maushuf* (sifat-yang disifati), melainkan susunan *idlafah* (aneksi). Karena itu di antara kedua kata tersebut terkandung kata imbuhan, dapat berimbuhan *min* (dari) atau *fii* (di). Seperti pada kalimat *khatamu hadidin*, artinya cincin 'dari' besi; *qiyamul lail*, artinya shalat 'di' malam hari. Maka rangkaian 'Islam Nusantara' bermakna Islam hidup di Nusantara. Kata 'Nusantara' bukan sifat dari Islam, tetapi sebagai *idlafah* (Subhan Ma'mun, 2015).

Islam Nusantara sesungguhnya hanya penyerdehanaan dari tipologi Islam Indonesia hasil perpaduan antara Islam dengan kebudayaan Nusantara (Said Aqil Siraj: 2015). Nusantara dalam prespektif tidak hanya segi geografis, lebih jauh dari itu Nusantara merupakan *encounter culture* (pusat pertemuan budaya) dari seluruh dunia. Mulai dari budaya Arab, India, Turki, Persia termasuk budaya Barat yang kemudian melahirkan budaya dan tata nilai yang khas di bumi Nusantara. Oleh karena itu, Nusantara bukan dimaknai dari sudut pandang geografis melainkan sudut pandang filosofis dan menjadi wawasan sebuah pola pikir, tata nilai dan cara pandang dalam melihat dan menghadapi budaya yang datang.

Islam Nusantara dapat dimaknai berdasarkan banyak pendekatan. *Pertama*, menurut pendekatan filosofis yang memunculkan lima istilah. Islam Nusantara adalah istilah yang bersifat non-positivistik, pisau analisa, islam substantif, dan sebagai sistem nilai. Isom Yusqi (nu.or.id), mengungkapkan bahwa Islam Nusantara merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji Islam yang dapat melahirkan berbagai disiplin ilmu. Seperti fikih nusantara, *siyasah* nusantara, *muamalah* nusantara, *qanun* nusantara, perbankan Islam nusantara, ekonomi Islam nusantara, dan berbagai cabang ilmu Islam lain.

Menurut Zainul Bizawie (nu.or.id), Islam Nusantara bukanlah objek keilmuan tapi subjek keilmuan yang dapat digunakan sebagai “pisau analisis” budaya muslim lain. Misalnya, menggunakan kaidah ushul fiqh yang bertujuan *maqashid al-syari’ah* (tujuan syariat), yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, suatu kebaikan dan kemanfaatan yang bernaung di bawah

lima prinsip pokok, yaitu *hifz addin, al-aql, an-nafs*, dan *al-mal*. Sehingga Islam Nusantara dapat berposisi sebagai teori yang dapat mengkaji Islam.

Sedangkan Quraish Shihab ingin menjelaskan Islam Nusantara secara ontologis. Terlepas dari pro dan kontra, Shihab melihat Islam Nusantara pada sisi “substansi”, bukan bentuk. Apabila ada bentuk (budaya) yang secara substansi sesuai dengan Islam maka akan diterima, jika bertentangan akan ditolak dan direvisi. Inilah prinsip Islam dalam beradaptasi dengan budaya. Jadi Islam itu dapat menimbulkan akibat keragaman budaya setempat. Bahkan adat, kebiasaan dan budaya dapat menjadi salah satu sumber penetapan hukum Islam.

Mustofa Bisri, menempatkan Islam Nusantara secara aksiologis sebagai “sistem nilai” dan penerapannya dalam menanggapi masalah-masalah aktual dari waktu ke waktu. Mustofa Bisri dalam Ahmad Sahal menyatakan Islam Nusantara adalah Islam yang sering kita jalani di Indonesia (Musthofa Bisri, 2016: 14) Nilai itu yang selama ini dipraktikkan, diresapi, dan dijadikan prinsip warga NU, seperti *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang/harmoni), *tawassut* (moderat), *ta’addul* (keadilan), dan *‘amr ma’ruf nahi munkar*.

Kedua, pendekatan Islam Nusantara melalui budaya. Pendekatan ini memunculkan tiga istilah, yaitu Islam Nusantara sebagai Islam bahari, Islam sehari-hari, dan model. Islam Nusantara sebagai “islam bahari” adalah praktik keislaman yang diwarisi dari gaya hidup masyarakat bahari atau masyarakat maritim yang biasa berhubungan dengan para pendatang baru dari berbagai pulau. Radhar Panca Dahana (2015) mengungkapkan

bahwa Setidaknya ada kecocokan karakter yang ada pada Islam Nusantara yang berbeda-beda, terbuka, egaliter dan tidak merasa paling tinggi satu sama lain dengan karakter masyarakat maritim di Indonesia yang lurus dan setara. (nu.or.id)

Isitilah Islam Nusantara sebagai "islam sehari-hari" dimaknai oleh Faisol Ramdhoni (2015), yakni pelaksanaan ajaran Islam. Baik terkait tata cara peribadatan, ritual, maupun tradisi keagamaan lainnya yang telah dilakukan, diturunkan, serta ditanamkan oleh para leluhur dalam praktik keagamaan keseharian masyarakat. (nu.or.id). Sementara Islam Nusantara sebagai model merupakan gagasan Imam Bukhori, Dawam Multazam, dan Imam Aziz (nu.or.id), dijadikan sebagai contoh islam ideal yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Diperkuat oleh pendapat Yeni Wahid (2017) yang mengatakan bahwa Islam model Indonesia atau dikenal luas dengan Islam Nusantara, merupakan sebuah sistem ajaran keislaman yang moderat dan tidak ekstrim. Ajaran Islam ini sudah teruji sepanjang Indonesia, bahkan sebelum Indonesia dikenal sebagai sebuah negara (nu.or.id)

Ketiga, pendekatan historis-antropologis yang memunculkan istilah Islam Khas Indonesia. Yang dimaksud Islam Nusantara sebagai Islam khas Indonesia adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Dalam konteks ini, budaya suatu daerah atau negara tertentu menempati posisi yang setara dengan budaya Arab dalam menyerap dan menjalankan ajaran Islam. Suatu tradisi Islam Nusantara menunjukkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah di Indonesia yang

melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut. (nu.or.id, 2016). Islam Nusantara merupakan keberagaman umat muslim yang terbangun atas dasar kondisi sosial-budaya-sejarah Nusantara yang panjang.

Dalam konteks ini, Azyumardi Azra mendefisikan Islam Nusantara sebagai Islam distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia. (Edy Susanto, 2016: 65). Islam Nusantara merupakan paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syari'at dengan realita dan budaya setempat.

Berdasarkan pengertian di atas, Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara (Indonesia), atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Namun jika dikaitkan dengan pandangan setiap muslim atau organisasi Islam tertentu, konsep Islam Nusantara akan menjadi kompleks. Sebagaimana terjadi dalam organisasi Islam terbesar di dunia, NU. Meskipun secara resmi istilah ini diluncurkan sebagai tema muktamar ke-33 di Jombang, yakni "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan dunia", tetapi para tokoh di dalamnya memiliki konsep yang berbeda-beda.

Pemahaman tentang formulasi Islam Nusantara menjadi penting untuk memetakan identitas Islam di negeri ini. Islam Nusantara dimaksudkan sebuah pemahaman keislaman yang bergumul, berdialog dan menyatu dengan kebudayaan Nusantara, dengan melalui proses seleksi, akulturasi dan adaptasi (Abdul Mun'im, 2010). Islam nusantara tidak hanya terbatas pada sejarah atau

lokalitas Islam di tanah Jawa. Lebih dari itu, Islam Nusantara sebagai *manhaj* atau model beragama yang harus senantiasa diperjuangkan untuk masa depan peradaban Indonesia dan dunia (Ahmad Baso, 2015). Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub-kultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima orang Nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya yakni *rahmatan lil 'alamin*.

Pribumisasi Islam: Kontekstualisasi Ajaran Islam Nusantara

Gagasan Gus Dur yang membahas langsung tentang "Pribumisasi Islam" dipaparkan dalam dua tulisan, yaitu tulisan yang berjudul "salahkah jika dipribumikan? Yang merupakan tulisan kolom Gus Dur pada majalah Tempo tanggal 16 Juli 1983 dan yang kedua, tulisan yang berjudul "Pribumisasi Islam" sebuah antologi tulisan dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh. Gagasan pribumisasi Islam merupakan gagasan cemerlang Gus Dur dalam rangka menjawab problem yang dihadapi umat Islam dalam lintas sejarahnya bahkan sampai sekarang, yakni bagaimana mendialogkan budaya ('adah) dengan ketentuan hukum Islam (syariah).

Berkaitan dengan ide pribumisasi Islam, Gus Dur berargumen (Wahid, 1989: 332) bahwa agama Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing, akan tetapi keduanya mempunyai wilayah yang tumpang tindih. Agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki normanya sendiri.

Karena bersifat normatif, maka ia cenderung permanen, sedangkan budaya adalah buatan manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Di sinilah adanya akomodasi atau rekonsiliasi. Proses itu harus dilakukan secara alami, bukan terpaksa dan itulah terjadinya pribumisasi.

Maka pemikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam merupakan bentuk kontekstualisasi ajaran Islam Nusantara. Said Agil Siraj menambahkan pengertian bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam menjadi karakter Islam Nusantara. Sehingga Islam Nusantara dapat mensinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara *tadriji* (bertahap). Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan (seperti *pesantren*) serta sistem Kesultanan). Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya Nusantara. (nu.or.id, 2016).

Dituturkan oleh Umarudin Masdar (1999: 141) bahwa proses pertumbuhan Islam sejak nabi Muhammad, sahabat, para ulama tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini budaya masyarakat arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam,

tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan secara diametral dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu. Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat.

Dalam konteks Islam Nusantara, Sejak awal para pendahulu menyebarkan Islam dengan cara kedamaian, bukan dengan pertumpahan darah. Senjata dakwah yang digunakan adalah kebudayaan. Wali Songo misalnya, mempelajari terlebih dahulu kebudayaan setempat sebelum berhasil berdakwah di tanah Nusantara (Jawa). Faktanya pendekatan kebudayaan ini efektif. Islam mengalami akselerasi mulai abad 12, 13 hingga abad 15 masehi. Padahal, sejak abad 7 masehi Islam sudah masuk ke Nusantara namun lama tidak berkembang (Azra, 2007).

Agama dan budaya bagaikan uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Agama (Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah (Wahid, 2001: 117). Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.

Dalam proses islamisasi nusantara, budaya lokal harus tetap dilestarikan dengan baik tanpa mengesampingkan budaya-budaya modern. Tidak serta merta menghilangkan budaya yang ada merupakan proses masuknya Islam nusantara yang mengarahkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian budaya dan menghargai budaya yang ada. Hal ini dipertegas oleh Gus Dur dengan merumuskan

tentang pemahaman keagamaan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan tanpa mengesampingkan budaya yang ada. Konsep inilah dalam pandangan Gus Dur dikenal dengan istilah "Pribumisasi Islam", bahwa menurut Gus Dur Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim, hal ini terlihat misalnya: kata "saudara" tidak perlu diganti "ikhwan", "langgar" diganti "mushola", "sembahyang" diubah menjadi "shalat". Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidakpedean umat Islam.

Pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi, sebab Pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Budaya sebagai hasil kreatifitas pemikiran manusia sebaiknya dibiarkan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. (Wahid, 2001: 119). menurut Gus Dur, yang disebut pribumisasi Islam adalah dialektika antara konteks yang berbeda-beda dengan nash. Pribumisasi Islam tidaklah mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.

Islam tidak mengubah praktik kehidupan yang ada pada masyarakat, Islam juga tidak merusak dan menghancurkan tradisi budaya lokal yang ada di masyarakat. Dalam bahasa Ngatawi Al-Zastrow (2017) menyebut dengan istilah afinitas budaya yang sama sekali berbeda dengan sinkretisme. Ibaratnya, proses pribumisasi Islam ini seperti "*mlitir tampar*". karena unsur-unsurnya dapat dilihat, tidak dilebur. Jadi posisi Islam

itu bukan sebagai penghancuran, tetapi ada dialektika yang dinamis. Inilah yang disebut pribumi Islam. Pribumisasi Islam ala Gus Dur bukan menciptakan hukum, tapi menerapkan hukum. Gus Dur hanya memberi nama dari suatu proses yang sudah berjalan. Ngatawi melanjutkan bahwa terjadi antara pribumisasi Islam dengan Islam Nusantara merupakan sebuah transformasi. Islam Nusantara merupakan kelanjutan dari proses pribumisasi Islam yang terjadi di Nusantara. Dalam konteks ini, pribumisasi Islam merupakan strategi dasar dari Islam Nusantara. (nu.or.id)

Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong (Wahid: 2001, 117).

Pribumisasi Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.

Gagasan Gus Dur ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas *pluralisme* kebudayaan yang ada (multikulturalisme). Gus Dur dengan tegas menolak "satu Islam" dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.

Menurut Gus Dur, bentuk Islam yang universal telah dinyatakan dalam rangkaian ajaran Islam sendiri, seperti *fiqh*, *tauhid*, *akhlak*, dan sikap hidup Islam yang menampilkan kepedulian pada unsur kemanusiaan (*al-insaniyyah*) (Wahid, 2007: 3). Islam mengemban misi memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat manusia, menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, egaliter, musyawarah, toleransi, persaudaraan, perdamaian, tolong-menolong, rukun, damai, saling menghormati, menghargai, melindungi, memuliakan dan sebagainya (Abudin Nata, 2011: 12)

Bahkan Gus Dur menolak adanya pencampuran kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokratisasi (campur tangan birokrasi) kebudayaan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan *pluralistik*, pola

kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya.

Konsep "Pribumisasi Islam" yang diusung oleh Gus Dur nampaknya ingin menunjukkan substansi penghargaan atas budaya-budaya lokal. konsep yang diangkat Gus Dur ini bermula dari analisisnya terhadap pola penyebaran dan interaksi antara universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam dengan peradaban lain seperti Persia dan Yunani pada masa Klasik. Juga dari analisisnya terhadap pola penyebaran Islam di Indonesia dan hubungannya dengan budaya lokal secara damai. Karenanya, Pribumisasi Islam adalah upaya rekonsiliasi Islam dengan budaya lokal atau akomodasi budaya lokal. Rekonsiliasi itu dapat tercipta melalui pemahaman *al-nas* dengan mempertimbangkan faktor kontekstual.

Suatu contoh yang digambarkan Gus Dur pada tembang/nyanyian "*Lir-Iilir*" (Tembang Sunan Kalijaga yang terkenal di kalangan orang Jawa) sebagai media dakwah Islam pada waktu itu. Tembang anak-anak berjudul "*lir-ilir*" tersebut, sebenarnya sudah berusia ratusan tahun, ia menjadi bagian *inheren* dari sebuah pendekatan strategis yang dibawakan Sunan Ampel di akhir masa kejayaan Majapahit. Dalam tembang itu tergambar jelas pendekatan beliau dan rekan-rekan terhadap kekuasaan, sebuah model perjuangan yang menurut penulis, baik untuk dijadikan kaca pembanding saat ini. Ketika itu, para Wali Sembilan (*Wali Songo*) di Pulau Jawa sedang mengembangkan dengan sangat baik sistem kekuasaan yang ada (Wahid, 2006: 285).

Para perintis gerakan Islam waktu itu, dengan sengaja mengusahakan hak bagi para penganut

agama Islam untuk bisa hidup di hadapan raja-raja yang sedang berkuasa di Pulau Jawa. Cara mengusahakan agar hak hidup itu diperoleh, adalah dengan mengajarkan bahwa kaum muslimin dapat saja mempunyai raja/penguasa non-muslim. Seperti Sunan Ampel mengakui keabsahan Brawijaya yang ber-agama Hindu-Buddha (*Bhairawa*). Inilah yang akhirnya membuat Brawijaya V beragama Islam pada masa akhir hayatnya dengan gelar Sunan Lawu (Wahid, 2006: 285). Strategi untuk memperkenalkan agama Islam kepada sistem kekuasaan yang ada, sangat jelas, yaitu menekankan pada pendekatan budaya daripada pendekatan ideologis yang sangat berbau politik. Dalam kerangka "membudayakan" sebuah doktrin kalangan *ahlus sunnah* tradisional itulah, sebuah doktrin sentral dikemukakan melalui sebuah tembang anak-anak.

Begitu juga dengan pendekatan masyarakat bahasa lokal yang kaya akan nilai-nilai karakter. Sebagaimana lagu "*Tombo Ati*" yang merupakan nama sebuah sajak berbahasa Arab ciptaan Sayyidina Ali, yang oleh KH. Bisri Mustofa dari Rembang (ayah KH. A. Mustofa Bisri) diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan judul tersebut. Dalam sajak itu, disebutkan 5 hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. Gus Dur menuturkan

Ketegasan Gus Dur dalam menjaga Tradisi dan terus melakukan pembaharuan sebuah nilai tidak terlepas dari salah satu adagium "harta warisan" yang dipakai NU sebagai patokan adalah: "memelihara apa yang baik dari masa lampau, dan menggunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru (*al-muhâfadzatu'alâ al-qadîmi al shâlih wa*

al akhdzu bi al jadid al-ashlâh)(Wahid, 2006:26).

Dari contoh tersebut Gus Dur menegaskan lagi adanya kontekstualisasi ajaran Islam melalui budaya lokal merupakan pendekatan keislaman dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai budaya yang ada serta mengkombinasikan dengan budaya modern dalam rangka mencapai tujuan Islam untuk menyampaikan pesan moral dan karakter bagi generasi penerus bangsa. Melihat proses interaksi sosial dan ideologis antara Islam dan masyarakat Nusantara, jelas terlihat bahwa pribumisasi Islam merupakan strategi islamisasi Nusantara melalui kontekstualisasi ajaran Islam yang melahirkan berbagai bentuk pemikiran, tradisi dan budaya Islam khas Nusantara yang akhirnya disebut dengan Islam Nusantara.

Pribumisasi Islam: Sinergi atas Budaya dan Islam di Nusantara

Pribumisasi Islam dalam persepektif Gus Dur ini tentunya sangat berbeda dengan praktik berislam yang berorientasi pada purifikasi atau pemurnian ajaran Islam yang berorientasi pada masa lalu (asal muasal Islam). Pribumisasi Islam tidak berorientasi pada masa lalu, namun berpijak pada tradisi, kelokalan, dan kekinian sesuai konteks yang ada, dan dalam bahasa penulis bahwa pribumisasi Islam sebagai sinergi atas budaya lokal dan Islam.

Dalam pandangan Heru Prasetya (2015) bahwa proses panjang perjumpaan Islam dengan budaya lokal di nusantara telah melahirkan beragam ekspresi kebudayaan yang khas nusantara seperti arsitektur bangunan, tari, dan perayaan keagamaan, yang bagi sebagian orang kemudian dituduh sebagai bid'ah. Dengan proses semacam itu Islam

tidak hadir sebagai penggerus budaya lokal (gusdurian.net). Islam hadir di nusantara yang saat itu sudah merupakan peradaban dengan khazanah dan keragaman yang begitu kaya. Semua itu tidak dibumihanguskan atau dlenyapkan sebagaimana Rasulullah yang juga tidak lantas melenyapkan budaya lokal Arab.

Proses pribumisasi islam semacam itulah yang kemudian membentuk pola atau corak Islam Nusantara. Sebuah corak keberislaman yang moderat, damai, ramah, dan terbuka. Singkatnya, pribumisasi Islam adalah caranya, Islam Nusantara adalah buahnya. Dalam konteks kebangsaan, buahnya adalah Islam di Indonesia menjadi bagian dari proses kebangsaan yang bermuara pada Pancasila dan negara bangsa Indonesia. Wajah Islam Indonesia menjadi selaras dengan demokrasi, HAM dan pengakuan atas persamaan hak warga negara di depan hukum, sesuatu yang di belahan dunia Islam lain masih menjadi sumber pertengkaran dan keributan.

Gus Dur menuturkan bahwa, Agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan sosial, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia berkembang menurut menurut pertimbangan dunia itu sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidaklah hanya mempengaruhi tetapi menentukan, maka dia (agama) telah menjadi duniawi(Wahid, 1999: 167). Kalau hal ini yang terjadi pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif (agama berusaha mempertahankan dirinya).

Islam Nusantara dari sisi substansinya merupakan paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara

sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas empiris dan budaya setempat, sehingga muncullah praktik berislam di bumi Nusantara (Afifuddin Muhajir, 2015). Perspektif *ushul fiqh*, proses dialektika antara *nash syariah* dengan realitas dan budaya tempat umat Islam tinggal itu sesuatu yang lumrah terjadi bahkan pasti terjadi mengingat Islam itu ajaran yang universal. Dan Islam Nusantara adalah wujud Islam sebagai agama universal yang pemeluknya mencapai ratusan juta penduduk Nusantara dan telah produk hukum serta khazanah keislaman telah banyak lahir.

Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar ini tersebar dalam literatur hukum agama (*al-kutub al-fiqhiyyah*) lama, yaitu jaminan dasar akan (1) Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum; (2) Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; (3) Keselamatan keluarga dan keturunan; (4) Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan (5) Keselamatan profesi (Wahid, 2007:5-6).

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintah berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang-rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan, dan dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam. Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur

dominan, seperti hilangnya batas etnis, kuatnya pluralitas budaya dan heterogenitas politik. Kosmopolitanisme itu bahkan menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Gus Dur berpendapat: "Bahwa kosmopolitanisme peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-muslim). Kosmopolitanisme seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencairan sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus menerus mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata, bukannya hanya dalam postulat-postulat spekulatif belaka."

Gus Dur melanjutkan pendapatnya bahwa "Sebuah agenda baru dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali universalitas ajaran Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam di masa mendatang. Pengembangan agenda baru itu diperlukan, mengingat kaum muslimin sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dan sangat eksklusif, sehingga tidak mampu lagi mengambil bagian dalam kebangunan peradaban manusia yang akan muncul di masa pasca-industri nanti (yang sekarang sudah mulai tampak sisi pinggirannya dalam kibernetika dan rekayasa biologis).

Kaum muslimin sekarang bahkan merupakan beban bagi kebangkitan peradaban baru ummat manusia nanti. Dalam keadaan demikian, kaum muslimin hanya akan menjadi objek perkembangan sejarah, bukannya pelaku yang bermartabat dan berderajat penuh seperti yang lainnya. Jika itu yang diinginkan, mau tidak mau harus dikembangkan agenda universalisasi ajaran Islam. Sehingga terasa kegunaannya bagi ummat manusia secara keseluruhan. Toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dan keperihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum muslimin sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas kaum muslimin dewasa ini. Dari proses itu akan muncul kebutuhan akan kosmopolitanisme baru yang selanjutnya akan, bersama-sama paham dan ideologi lain-lain, turut membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial-ekonomis dan kebiadaban rezim-rezim politik yang lalim. Hanya dengan menampilkan universalisme baru dalam ajarannya dan kosmopolitanisme baru dalam sikap hidupnya para pemeluknya, Islam akan mampu memberikan perangkat sumber daya manusia yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil (Wahid, 2007: 13-14)

Benar apa yang dikatakan Greg Barton bahwa: Gus Dur merupakan seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang

dihasilakan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Gus Dur sangat kritis terhadap budaya tradisional (Greg Barton, 1999: xxxvi). Menurut Gus Dur, metodologi pribumisasi Islam sesungguhnya sederhana, yakni dengan menggunakan *ushul fiqh* dan *qaidah fiqhiyah* seperti *al-'adah muhakkamah* (adat istiadat bisa menjadi hukum) dan *al-muhafazatu bi qadimis ash-shalih wal-ahdzu bil jadid al-ashlah* (memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola *amar ma'ruf nahi mungkar* diselaraskan dengan konsep *mabadi khoiro ummah*). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam (Thoha, 201: 205). Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan "aspirasi Islam" menjadi "aspirasi nasional". Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengerim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama.

Islam yang merupakan agama *rahmatan lil alamin* haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul

akibat proses modernisasi. Mengapa demikian? Karena ajaran agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem kehidupan para pemeluknya, oleh karenanya tokoh agama mempunyai peran kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan umat Islam dan non muslim dengan mempertimbangkan realita (pluralitas masyarakat dan proses modernisasi serta pengaruh globalisasi).

Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan "pos pertahanan" untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh proses sekulerisasi. Kecenderungan statis ini menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam baru mampu menolak kemungkaran, kebaktilan dan kemaksiatan dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam arti yang luas (Wahid, 1999: 38).

Di sini kita berhadapan dengan situasi yang oleh Ibn Rusyd dalam pengantar kitabnya, *Bidayatul Mujtahid* dirumuskan sebagai ketegangan antara *al-nushush al-mutanahiyah* dan *al-waqa'i ghair al-mutanahiyah* (Nash atau teks syariah yang terbatas, selesai di satu sisi, dan lahirnya ragam peristiwa/kenyataan baru yang bersifat tak terbatas, tak habis-habis) di sisi lain. Dan kemunculan *al-waqa'i' ghair al-mutanahiyah* tersebut terjadi karena adanya konteks ruang dan waktu yang baru, yang berbeda dengan konteks di mana Nabi hidup (islamnusantara.com, 2017). Dalam konteks keindonesiaan misalnya, umat Islam Indonesia hidup pada suatu

masa yang terpaut ribuan tahun lamanya dari era Nabi, dan berada di suatu wilayah terpaut ratusan ribu kilometer jauhnya dari tanah Arab, tempat asal Nabi. Umat Islam Indonesia jugamemiliki karakteristik budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda sekali dari Arab. Realitas keIndonesiaan adalah konteks baru yang membuka peluang bagi lahirnya persoalan-persoalan baru terkait hukum Islam, yang bisa jadi tidak bisa ditemukan rujukannya secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Dialektika antara konteks yang berbeda-beda dengan nash inilah yang disebut Gus Dur sebagai "pribumisasi Islam" yang nota bene merupakan manifesto Islam Nusantara.

Konsep pribumusasi Islam yang disusung oleh Gus Dur tentunya ingin memberikan cara pandang seseorang dalam mensikapi dan memahami agama tidak hanya dari luarnya saja, atau dalam hal ini Islam memang datang dari negara Arab akan tetapi nilai Islam yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan budaya arab yang harus disamaratakan dan diterapkan dalam kehidupan beragama. Kalau Islam dimaknai sebagai agama Arab dan mengikuti budaya Arab, maka nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh Islam akan terasa sempit jadinya. Gus Dur hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberi jalan tengah bahwa Islam hadir sebagai *rahmatat lil 'alamiin* sebagai agama yang mampu menanamkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan yang majemuk dan plural.

Pribumisasi Islam adalah cara muslim yang dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam wilayah ubudiyah tapi juga mu'amalah dan awa'id, tapi dengan kesadaran akan pentingnya konteks di mana ia hidup, karena dengan kesadaran itulah ia bisa

merealisasikan maslahat dan tujuan syariah. Mereka menghargai konteks lokal dan semangat zaman untuk memastikan bahwa maslahat sebagai tujuan syariah betul-betul membumi.

Islam Nusantara yang berdengung keras belakangan ini seyogyanya tidak disorong untuk sekedar memuja masa lalu, namun harus terus melakukan sinergi antara budaya dan Islam untuk hidup di masa kini dan menatap masa depan. Islam Indonesia telah sampai pada pencapaian yang belum bisa disamai oleh dunia islam lain tersebut (pengakuan pada persamaan hak dan demokrasi) harus dijaga dan dipelihara, sehingga Islam Nusantara di masa mendatang dapat diabdikan untuk mampu menjawab tantangan masa depan dalam kehidupan bermasyarakat yang plural.

Simpulan

Signifikansi makna "pribumisasi" dalam pribumisasi Islam" dan ajektif "Nusantara" pada Islam Nusantara. Poin utamanya bukan kebencian terhadap Arab, dan antipasti terhadap budaya Arab, melainkan kesadaran bahwa ber-islam secara kaffah tak lantas berarti mengganti tradisi sendiri dengan tradisi Arab. Dalam rumusan Gus Dur, "Bahaya dari proses arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan."

Ideologi pemikiran Gus Dur dan penghormatannya terhadap pluralitas sepenuhnya berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan juga tradisi keilmuan NU sendiri. Ajaran Islam digali secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui pemikiran, NU terhindar dari pendekatan tekstual dan interpretasi

tunggal terhadap al-Qur'an dan al-Hadis, karena dalam tradisi NU sendiri memegang teguh pendapat (*al-muhâfadzatu'alâ al-qadîmi al shâlih wa al akhdzu bi al jadîd al-ashlâh*), sehingga dalam menafsiri dan mengamalkan tentang keberagaman, Gus Dur mengajarkan toleransi yang tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain.

Karakteristik pemikiran Gus Dur sangatlah bersifat teologis antropologis yang mengedepankan kontekstual kemasyarakatan. Gus Dur berusaha menanamkan wawasan keilmuan teologi Islam yang berbasis pada *nash* agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan mendeskripsikan secara antropologis kondisi riil umat Islam tanpa harus membenturkan antara suatu aliran teologi dengan aliran teologi lainnya, disinilah maka terbentuk cara praktis untuk menyebarkan agama Islam melalui pribumisasi Islam yang akan melahirkan Islam Nusantara. Pribumisasi Islam merupakan cara yang digunakan, sedangkan Islam Nusantara merupakan bentuk yang dihasilkan. Pribumisasi Islam dengan cara mengkontekstualisasikan Islam di Nusantara. Pribumisasi Islam juga hasil sinergi antara budaya dan Islam yang ada di Nusantara. Keduanya saling melengkapi dalam rangka membentuk masyarakat Islam yang adil, toleran, moderat, dan penuh pertimbangan dan kedamaian.

Dilihat dengan cara demikian, pribumisasi islam dan Islam Nusantara sejatinya justru merupakan manifestasi dari Islam kaffah, yakni Islam yang komprehensif dan menyeluruh. Pada saat yang sama, Islam Nusantara juga membuktikan

bahwa Islam adalah ajaran yang shalihun li kulli zaman wa makan (cocok untuk seluruh masa dan tempat).

Daftar Rujukan

- Ahmadun, Ali dan Niam, Mukafi. 2017. *Islam Nusantara, Manifesto Proses Pribumisasi Islam*. <http://www.nu.or.id/post/read/76697/islam-nusantara-manifesto-proses-pribumisasi-islam-> diakses pada 3 Maret 2018.
- Azizi, Nasrul (Ed.). 2011. *Pertikaian di Ambon Bukan Konflik Agama*, Harian Kompas <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/02/20394476/Pertikaian.di.Ambon.Bukan.Konflik.Agama/> diakses pada 27 Januari 2018
- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana
- Barton, Greg. 2008. *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS
- Baso, Ahmad. 2000. "Islam Liberal sebagai Ideologi Nurcholis Madjid versus Abdurrahman Wahid", dalam *Gerbang*, Vol. 6 No. 03, Pebruari-April
- Bisri, A. Mustofa. 2016. "Islam Nusantara, Makhluq Apakah Itu?", dalam Ahmad Sahal, (Ed.), *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Dahana, Radhar Panca. 2015. *Islam Nusantara = Islam Bahari* <http://www.nu.or.id/post/read/59116/radhar-islam-nusantara--islam-bahari> diakses pada 30 Januari 2018
- Fatono, M. Sulton. 2015. *Islam Nusantara Perspektif Tradisi Pemikiran NU*. <https://news.detik.com/kolom/d-2977748/islam-nusantara-perspektif-tradisi-pemikiran-nu> diakses pada 3 Maret 2018
- Helmy, Masdar. 2003. *Menggagas Paradigma Pendidikan berbasis multikulturalisme*, Jurnal Ulumuna, Volume VII Edisi 12.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. 2016. *Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*. Jurnal Shahih Vo. I Nomor I, Januari-Juni 2016 (Surakarta: LP2M IAIN Surakarta)
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Misrawi, Zuhairi. 2012. *Konflik Sunni-Syiah di Madura?* Koran SINDO pada <http://nasional.sindonews.com/read/2012/08/28/18/667841/konflik-sunni-syiah-di-madura/> diakses pada 17 Desember 2017
- Molasy, Honest. 2013. *Mengurai Akar Konflik Sunni Syiah di Puger – Jember*, Harian Kompas <http://politik.kompasiana.com/2013/10/02/mengurai-akar-konflik-sunni-syiah-di-puger-jember-597798.html/> diakses pada 27 Januari 2017
- Mu'min, Ma'mun. 2012. *Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Filosofis*, Jurnal Ad-Din: Media Dialektika ilmu Islam, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2012
- Muhajir, Afifuddin. 2015. "Maksud Istilah Islam Nusantara" Aula Majalah Nahdlatul Ulama No.08 SNHXXXVII Agustus
- Nata, Abudin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana
- Prasetia, Heru. 2015. *Pribumisasi Islam Dan Islam Nusantara*. <http://www.gusdurian.net/id/a>

- rticle/sorot/Pribumisasi-Islam-dan-Islam-Nusantara/ diakses pada 2 Maret 2018.
- Rozali, Ahmad dan Alawi, Abdullah. 2017. *Model Islam Nusantara Dipromosikan di Denmark* <http://www.nu.or.id/post/read/76542/model-islam-nusantara-dipromosikan-di-denmark> diakses pada 3 Maret 2018
- Susanto, Edy dan Karimullah. 2016. *Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi Budaya Lokal*, Jurnal Al-Ulum Vol. 16 Number 1
- Thoha, Zainal Arifin. 2001. *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*. Yogyakarta: Gama Media
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tim INCReS. 2000. *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran Dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wahid Foundation. 2016. *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2016* Wahid Foundation. Jakarta: Wahid Foundation
- Wahid, Abdurrahman. 1989. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Kata Pengantar M. Dawam Raharjo*. Jakarta: P3M
- Wahid, Abdurrahman. 1995. "Agama dan Demokrasi", A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Membangun Demokrasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS, 1999
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda Islam Kita*, Cet. I. Jakarta: The Wahid Institute
- Wahid, Abdurrahman. 2007. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute
- Wahid, Abdurrahman. 2011. *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata pengantar*, Tri Agus Siswiharjo dkk, (peny). Bandung: Nuansa
- Wahid, Adurrahman dkk. 1993. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahyu, Anhar. 2012 *Perang Suku di Lampung Sebuah Dendam Lama*. Harian Kompas <http://regional.kompasiana.com/2012/10/30/perang-suku-di-lampung-sebuah-dendam-lama-505234.html>// diakses pada 10 Januari 2018
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *PendidikanMultikultural : Cross-Cultural Understanding untuk DemokrasidanKeadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- _____. 2017. *Menimbang Pribumisasi Islam Gus Dur Antara Islam Nusantara dan Islam Arab*. <http://islamnusantara.com/menimbang-pribumisasi-islam-gus-dur-antara-islam-nusantara-dan-islam-arab/> diakses pada 2 Maret 2018